

Perawatan yang Beracun: Kerja Perawatan Perkebunan dan Reproduksi Sosial dalam Perkebunan Monokultur Sawit

Toxic Care: Plantation Maintenance Work and Social Reproduction on Monoculture Oil Palm Plantation

Hariati Sinaga

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

hariati.sinaga@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 9 November 2023, direvisi 12 Desember 2023, diputuskan diterima 24 Desember 2023

Abstract

The expansion of oil palm plantation has drawn scholarship attention. On one hand, studies have examined how oil palm plantation development serves an important instrument for employment creation, poverty alleviation and rural development. On the other, there is plenty of research that shows adverse impacts of such expansion on socio-ecological conditions. This includes the recruitment of women plantation workers into maintenance work with flexible labour relations. Meanwhile, literature on oil palm plantations in Indonesia has not paid significant attention on care work. Employing feminist political economy perspective, this article attempts to understand care work in monoculture oil palm plantations, particularly in relations to maintenance work on plantation. Through the concept of social reproduction, care work is understood in a broader terms as a way to draw the entanglement between production and reproduction in monoculture oil palm plantations. This article argues that women workers participation into maintenance work on plantations show the articulation of social relations based on patriarchal system with palm oil competition in the global market. From the perspective of the women workers, participation in the maintenance work is viewed as a livelihood strategy. The strategy that involves works with risk of regular exposure to toxic chemicals is understood as toxic care.

Keyword: care work, social reproduction, oil palm plantation, women workers

Abstrak

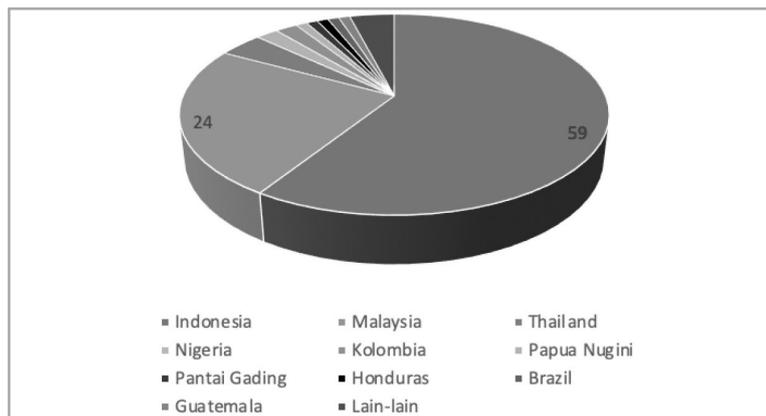
Perkembangan perkebunan sawit telah menarik perhatian kajian ilmiah. Di satu sisi, berbagai studi membahas mengenai pentingnya pengembangan perkebunan sawit sebagai upaya dalam menyediakan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Di sisi lain, tidak sedikit laporan dan studi yang mengungkap dampak negatif ekspansi perkebunan terhadap kondisi sosial-ekologis suatu masyarakat dan lingkungannya. Salah satunya adalah perekrutan buruh perempuan di bagian perawatan perkebunan dalam relasi kerja yang fleksibel. Sementara itu, topik kerja perawatan dalam perkebunan sawit masih kurang mendapat perhatian dalam literatur perkebunan sawit Indonesia. Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik feminis, artikel ini berusaha untuk mengkaji kerja perawatan dalam perkebunan monokultur kelapa sawit, khususnya dalam hubungannya dengan kerja perawatan perkebunan. Melalui konsep reproduksi sosial, kerja perawatan dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai upaya untuk menangkap kelindan antara produksi dan reproduksi dalam perkebunan monokultur kelapa sawit. Artikel ini berpendapat bahwa partisipasi buruh perempuan dalam kerja perawatan perkebunan di perkebunan monokultur sawit menunjukkan artikulasi relasi sosial masyarakat yang berlandaskan sistem patriarki dengan kompetisi minyak sawit dalam pasar global. Dari sisi buruh perempuan, partisipasi dalam kerja perawatan perkebunan dipandang sebagai suatu strategi penghidupan. Strategi yang melibatkan kerja yang berisiko paparan racun kimia secara terus-menerus ini dapat disebut sebagai perawatan yang beracun.

Kata kunci: kerja perawatan, reproduksi sosial, perkebunan kelapa sawit, buruh perempuan

Pendahuluan

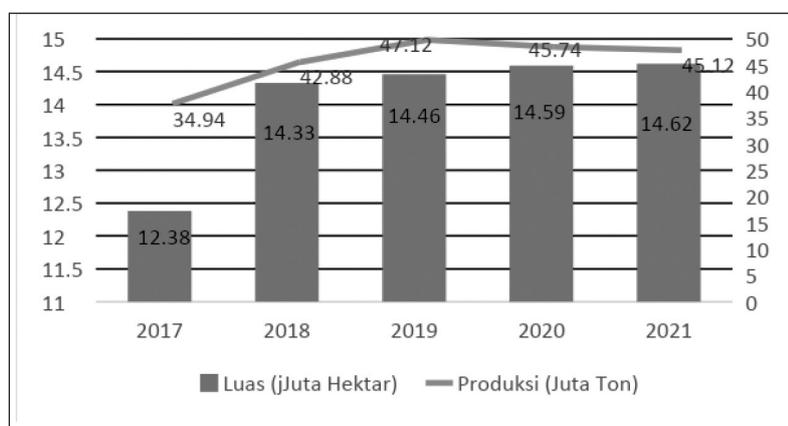
Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu primadona dalam sektor perkebunan Indonesia terutama karena posisi sektor perkebunan sawit Indonesia di pasar minyak nabati global. Sejak tahun 2007, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah (*crude palm oil*) terbesar di dunia. Menurut Gambar 1, Indonesia menyumbang sekitar 59 persen dari produksi minyak sawit dunia. Pada tahun 2021,

perkebunan sawit Indonesia mencapai 14.586.597 hektare dengan produksi mencapai 45.741.845 ton (Badan Pusat Statistik 2022). Posisi penting sektor perkebunan sawit Indonesia dibarengi dengan ekspansi perkebunan sawit. Gambar 2 menunjukkan tren ekspansi lahan dan produksi perkebunan sawit antara 2017--2021 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan.



Gambar 1. Presentasi Produksi Minyak Sawit terhadap Produksi Minyak Sawit Dunia Tahun 2023

Sumber: USDA Foreign Agricultural Service (2023)

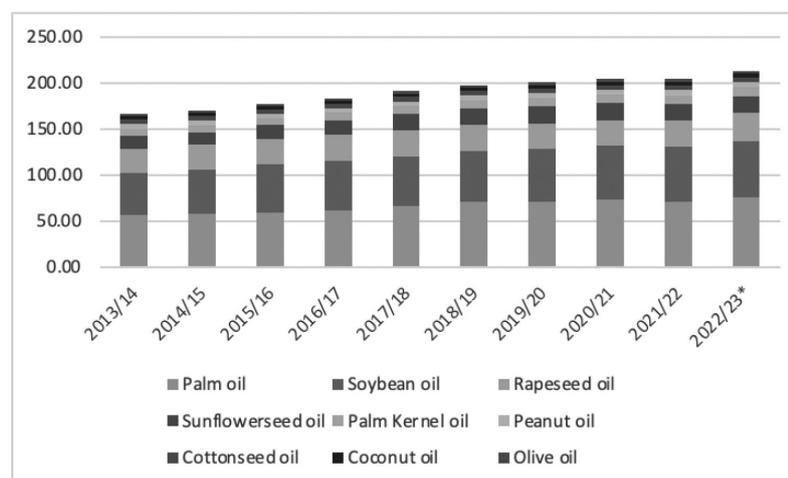


Gambar 2. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan Sawit Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

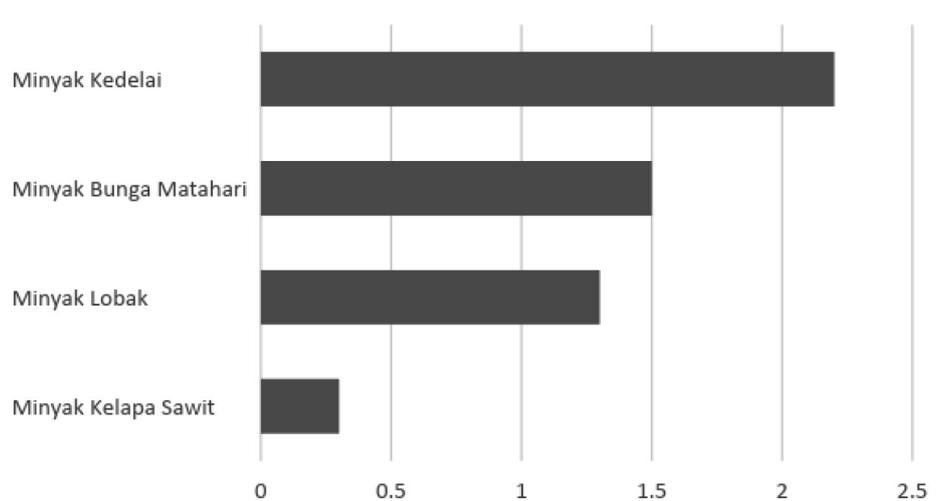
Pertumbuhan sektor perkebunan sawit Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi minyak sawit yang penting dalam pasar minyak nabati dunia. Gambar 3 menunjukkan bagaimana minyak sawit mendominasi konsumsi minyak sawit global. Hal ini

salah satunya disebabkan oleh pandangan bahwa sawit adalah komoditi yang paling efisien (lihat Gambar 4). Selain itu, minyak sawit juga dipandang sebagai komoditas yang fleksibel karena dapat diolah menjadi berbagai produk (Alonso-Fradejas et al. 2016).



Gambar 3. Konsumsi Minyak Nabati Global Berdasarkan Jenis Minyak Nabati (juta metrik ton)

Sumber: Statista (2023)



Gambar 4. Luas Areal yang Diperlukan untuk Produksi 1 Ton Minyak

Sumber: Kementerian Perindustrian (2021)

Pertumbuhan sektor perkebunan sawit Indonesia telah menarik perhatian akademik yang membahas aspek ekonomi dari perkebunan sawit. Berbagai studi mengangkat pentingnya perkembangan perkebunan sawit untuk pembukaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan (Rist et al. 2010; Zen et al. 2005). Sementara itu, studi-studi yang lain mengkaji dampak sosial dan ekologis dari ekspansi perkebunan sawit (Richter 2009; Colchester et al. 2006). Kondisi kerja di perkebunan sawit merupakan salah satu sorotan laporan dan kajian akademik mengenai dampak sosial dari ekspansi perkebunan sawit (Assalam & Parsaoran 2018). Salah satunya adalah cukup banyaknya buruh perkebunan yang berstatus buruh harian lepas (BHL), yang didominasi oleh perempuan (Sinaga 2021; Muttaqien et al. 2021).

Meski topik rentannya buruh perempuan di perkebunan sawit bukanlah hal yang baru, literatur yang berfokus pada kerja perawatan di perkebunan monokultur sawit masih relatif sedikit. Artikel ini berusaha untuk menganalisa kerja perawatan (*care work*) dalam sektor perkebunan monokultur sawit, khususnya dalam kaitannya dengan kerja perawatan perkebunan (*maintenance work*). Menggunakan konsep reproduksi sosial dalam kajian ekonomi politik feminis, artikel ini memahami kerja perawatan dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam keterkaitan antara ranah produktif dan reproduksi sosial. Dalam konteks 5R ILO yang meliputi pengakuan (*recognition*), pengurangan (*reduction*), pembagian (*redistribution*), perwakilan (*representation*), dan penghargaan (*reward*)

- maka analisa kerja perawatan perkebunan yang dilakukan buruh perempuan perkebunan merupakan langkah awal dari pengakuan mengenai peran para buruh ini dalam reproduksi sosial perkebunan sawit.

Berdasarkan analisa temuan dari studi kasus di empat perkebunan monokultur sawit di Sambas, Kalimantan Barat, artikel ini berpendapat bahwa keterlibatan buruh perempuan dalam perkebunan sawit harus dipahami dalam hubungan antara reproduksi sosial dan proses kerja di perkebunan monokultur kelapa sawit yang dipengaruhi oleh kompetisi minyak sawit dalam pasar global. Partisipasi buruh perempuan dalam kerja perawatan perkebunan (*maintenance work*) dapat dipahami secara lebih luas sebagai kerja perawatan (*care work*) dalam konteks reproduksi sosial perkebunan.

Artikel ini ditulis dengan struktur sebagai berikut: Bagian pertama berupa pendahuluan. Bagian kedua berisi metode penelitian. Bagian ketiga mengulas literatur terkait buruh perempuan di perkebunan sawit dan kaitannya dengan reproduksi sosial. Bagian keempat mengelaborasi kerangka pemikiran yang digunakan dalam artikel ini, yaitu kajian ekonomi politik feminis, khususnya, konsep kerja perawatan, dan reproduksi sosial. Bagian ini diikuti oleh gambaran singkat mengenai perkebunan sawit di Sambas. Temuan dari studi kasus perkebunan sawit di Sambas, Kalimantan Barat, dibahas di bagian keenam. Pada bagian ketujuh, penulis memaparkan analisa terhadap temuan yang disajikan di bagian sebelumnya. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Studi kasus dilakukan pada empat perkebunan (PT A, PT B, PT C, dan PT D) kelapa sawit monokultur di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan 22 orang buruh perempuan bagian perawatan dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dan dilakukan pada bulan Januari dan Juli 2023. Sebagian besar buruh perempuan berusia antara 30 hingga 50 tahun dan satu orang buruh perempuan lansia. Mereka sebagian besar adalah penduduk lokal yang memiliki latar etnis Melayu Sambas dan sebagian kecil merupakan keturunan transmigran dari Pulau Jawa. Satu orang buruh perempuan merupakan buruh migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Data wawancara dan diskusi kelompok terfokus kemudian ditranskripsi dan dianalisa menggunakan analisa konten kualitatif. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus dilakukan sebagai bagian dari proyek penelitian yang lebih besar dengan topik Transisi Berkeadilan di Industri Kelapa Sawit Indonesia. Perkebunan kelapa sawit wilayah Sambas, Kalimantan Barat, dipilih karena merupakan salah satu wilayah pengorganisasian dari salah satu serikat buruh perkebunan yang terlibat dalam proyek penelitian Transisi Berkeadilan di Industri Kelapa Sawit.

Pemahaman akan hubungan antara konsep reproduksi sosial dengan proses kerja dalam perkebunan monokultur sawit ingin dicapai oleh artikel ini. Artikel ini tidak mengkaji kerja perawatan dalam lingkup kerja domestik yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga buruh sebab topik ini sudah banyak dibahas dalam laporan dan studi tentang buruh perempuan di perkebunan sawit. Dengan berfokus kepada buruh perempuan bagian perawatan perkebunan, artikel ini membahas hubungan antara reproduksi sosial dan proses kerja perkebunan. Dalam melakukan upaya ini, penulis menggunakan studi kasus perkebunan monokultur kelapa sawit di Sambas, Kalimantan Barat. Pada dua bagian berikutnya, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan beserta profil singkat mengenai perkebunan kelapa sawit di Sambas, Kalimantan Barat.

Buruh Perempuan dan Reproduksi Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Berbagai kajian mengenai dampak sosial dari ekspansi perkebunan sawit di Indonesia mengungkap bagaimana perkebunan sawit menjadi sektor penyedia

lapangan kerja yang penting bagi masyarakat Indonesia (Dib et al. 2018; Dharmawan et al. 2020). Hal ini salah satunya digambarkan melalui rekrutmen buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Buruh perempuan pada umumnya bekerja di bagian perawatan di perkebunan. Menurut Yallita dan Mardhiah (2023), pembagian kerja ini dipengaruhi oleh faktor risiko kerja, psikologis, dan stigmatisasi buruh perempuan di perkebunan. Lebih lanjut, meski perkebunan sawit menjadi penyedia lapangan kerja bagi perempuan, buruh perempuan di Indonesia cenderung bekerja sebagai BHL (Buruh Harian Lepas). Karena kecenderungan status sebagai BHL, data yang akurat mengenai jumlah buruh perempuan yang bekerja di perkebunan sawit sulit ditemukan. Menurut *Center for International Forestry Research* (CIFOR 2017), terdapat sekitar 1,5 juta buruh perempuan yang bekerja di perkebunan sawit Indonesia, baik perkebunan skala besar maupun skala kecil. Menurut Sawit Watch (2019) terdapat 16,2 juta orang yang bekerja di perkebunan sawit Indonesia, dengan 4 juta orang bekerja secara langsung, dan sisanya bekerja secara tidak langsung. Yang belakangan juga mencakup buruh perempuan di perkebunan. Oleh karena itu, buruh perempuan di perkebunan sawit sering disebut sebagai *buruh siluman*. Selain mengerjakan kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar, sebutan *buruh siluman* ini juga digunakan untuk merujuk ke status buruh perempuan sebagai BHL. BHL perempuan di perkebunan sawit mendapat upah yang rendah dan tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Upah yang rendah berkaitan dengan relasi kerja yang fleksibel membuat buruh perempuan dibayar sesuai dengan jumlah Hari Kerja (HK). Selain itu, buruh perempuan tidak memiliki akses terhadap cuti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti cuti haid, cuti tahunan, dan cuti sakit.

Literatur mengenai buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit pada umumnya menunjukkan beban ganda yang ditanggung oleh buruh perempuan (Eliza 2021; Fatchiya et al. 2022). Selain harus melakukan pekerjaan di perkebunan, buruh perempuan juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Bahkan terkadang buruh perempuan juga mengambil pekerjaan tambahan di samping pekerjaan sebagai buruh perkebunan (Theresia & Wahyuni 2021). Hal ini dikarenakan upah rendah yang diterima oleh buruh perempuan.

Beban ganda atau bahkan beban rangkap tiga ini menyebabkan buruh perempuan di perkebunan memiliki waktu kerja yang lebih lama dibandingkan buruh laki-laki (Rowland et al. 2022).

Selain mengenai beban ganda yang ditanggung oleh buruh perempuan, berbagai kajian yang mengangkat isu gender dan perkebunan sawit menganalisa perubahan dan dinamika relasi gender terkait ekspansi perkebunan sawit. Hal ini secara khusus terkait dengan dampak gender dari perubahan relasi tanah akibat ekspansi perkebunan sawit. Julia dan White (2012) menunjukkan bagaimana artikulasi sistem patriarki lokal dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit memengaruhi pengalaman-pengalaman gender yang tercermin dalam relasi tanah, pembagian kerja, dan penghidupan. Secara khusus, perubahan dalam pembagian kerja berbasis gender tersebut menyebabkan perempuan harus bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, sebuah fenomena yang disebut sebagai feminisasi kerja pertanian (Julia & White 2012).

Persoalan lain yang muncul dari ekspansi perkebunan sawit adalah berkurangnya hutan adat di Kalimantan Tengah. Hal ini berdampak pada relasi gender masyarakat tenurial Dayak Ngaju, yang tercermin dalam dominasi laki-laki dalam relasi tenurial tersebut (Siscawati & Mahaningtyas 2012). Hal ini mengakibatkan perempuan kehilangan akses terhadap tanah dan penghidupan secara lebih luas. Penurunan akses penghidupan juga dialami oleh perempuan-perempuan Dayak Modang di Kalimantan Timur akibat perubahan akses gender terhadap sumber daya alam dan manfaat adat yang dibawa oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit (Toumbourou & Dressler 2020).

Meski literatur yang mengangkat tema gender dan perkebunan telah menunjukkan beban ganda perempuan di perkebunan dan aspek gender juga penghidupan yang lebih luas akibat perubahan relasi tenurial pascaekspansi perkebunan sawit, studi yang berfokus pada kerja perawatan dalam perkebunan sawit monokultur masih relatif sedikit. Dalam penelitian ini, kerja perawatan dipahami secara lebih luas, yaitu dalam pengertian reproduksi sosial. Sebagai upaya untuk menunjukkan dan menganalisa kelindan antara produksi dan reproduksi dalam perkebunan monokultur perkebunan sawit, pada bagian berikutnya, penulis menjabarkan kerangka pemikiran yang mendasari tulisan ini, yaitu kerja perawatan dan reproduksi sosial dalam perspektif ekonomi politik feminis.

Kerja Perawatan dan Reproduksi Sosial dalam Kajian Ekonomi Politik Feminis

Kerja perawatan dan reproduksi sosial adalah dua konsep yang penting dalam kajian ekonomi politik feminis. Kajian ekonomi politik feminis muncul sebagai kritik feminis terhadap kajian ekonomi politik dan kajian ekonomi politik kritis yang sama-sama mengabaikan relasi gender dalam menganalisa relasi antara negara dan pasar, khususnya dalam sistem kapitalisme global (Bedford & Rai 2010). Dalam kajian ekonomi politik feminis, relasi gender menjadi pintu masuk dalam mengkaji relasi antara negara, pasar, dan nonpasar, baik dalam konteks produksi maupun dalam konteks reproduksi sosial (Rao & Akram-Lodhi 2021). Berbagai analisa dari kajian ekonomi politik feminis memiliki kesamaan pandangan dengan kajian ekonomi feminis (Mezzadri et al. 2021). Termasuk mengenai konsep kerja perawatan dan ekonomi perawatan. Ekonomi perawatan pada dasarnya merujuk pada ekonomi yang berkaitan dengan kerja-kerja perawatan. Konsep ini awalnya muncul sebagai bentuk perhatian para ekonom feminis mengenai nilai ekonomi dari kerja perawatan khususnya dalam merumuskan kebijakan publik yang relevan, yang meliputi keadilan pembayaran, penilaian dari kerja nonpasar, dan dukungan publik terhadap orang tua (Folbre 1995). Nancy Folbre (2006) memahami ekonomi perawatan dalam kerangka kerja-kerja perawatan yang dapat dikategorikan berdasarkan hubungan kerja perawatan dengan pasar, karakteristik proses kerja, dan tipe-tipe penerima perawatan. Berdasarkan aspek hubungan antara kerja perawatan dengan pasar, kerja-kerja perawatan mencakup kerja-kerja subsisten yang tidak dibayar, kerja informal, dan kerja perawatan yang dibayar. Masing-masing kategori ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi kerja perawatan langsung yang mencakup keterlibatan personal dan emosional serta kerja perawatan tidak langsung yang mendukung kerja perawatan langsung. Dalam aspek karakteristik proses kerja, kerja perawatan dapat mengacu pada kerja-kerja yang melibatkan interaksi personal yang dekat atau interaksi emosional. Sementara dalam aspek penerima jasa kerja perawatan, terdapat anak-anak, orang tua, orang sakit, kelompok difabel, dan diri sendiri.

Nicola Yeates (2004) memahami kerja perawatan sebagai aktivitas atau hubungan yang membantu kesejahteraan fisik dan emosional pihak lain yang tidak dapat atau cenderung tidak dapat melakukan aktivitas tersebut. Baik konseptualisasi yang ditawarkan Folbre

maupun definisi yang diajukan oleh Yeates sama-sama memandang bahwa kerja-kerja perawatan tidak hanya dilakukan di rumah. Sesuai dengan hal ini, Paula England (2005) berpendapat bahwa kerja perawatan dapat dilakukan di rumah maupun disediakan oleh pasar dengan mendapatkan bayaran. Terkait kerja-kerja perawatan yang dibayar, dikenal konsep ekstraktivisme perawatan yang merujuk pada eksploitasi pekerja dan penipisan sumber daya di sektor kesehatan akibat dampak kebijakan neoliberalisme (Wichterich 2019). Konsep ekstraktivisme perawatan ini dapat dihubungkan dengan istilah perawatan korporat (Nading 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep kerja perawatan dan ekonomi perawatan pada awalnya berfokus pada hubungan antara kerja dan rumah tangga dengan upaya untuk menangkap bagaimana kerja-kerja perawatan memengaruhi karakteristik dari kerja dan hubungan pekerjaan (Mezzadri et al. 2021, hlm. 1788). Meski literatur feminis tentang kerja perawatan telah memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bagaimana kerja perawatan dapat dipahami, perlu ditekankan kembali bahwa kerja perawatan adalah konstruksi sosial sehingga batasan antara apa yang menjadi kerja perawatan dan tidak harus terus diproblematiskan. Lebih lanjut, penulis memahami kerja perawatan dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks reproduksi sosial.

Konsep reproduksi sosial menawarkan keterhubungan antara produksi barang dan jasa dengan produksi kehidupan (Luxton 2006, hlm. 36). Para pemikir feminis mengembangkan konsep reproduksi sosial menjadi teori reproduksi sosial (Bhattacharya 2017). Teori reproduksi sosial berupaya memetakan sistem kapitalisme sebagai suatu relasi sosial, yang melibatkan hubungan terintegrasi antara poin produksi dan ruang reproduksi tenaga kerja (Bhattacharya hlm. 4 & 7). Menurut teori ini, ruang reproduksi tenaga kerja tidak hanya terjadi di rumah, tetapi harus memperhatikan relasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, konsep reproduksi sosial menunjukkan bahwa perjuangan feminis tidak hanya terbatas pada keseimbangan antara kerja produktif dan rumah tangga, tetapi lebih dari itu, termasuk perjuangan perumahan yang layak, keamanan pangan, kerja dengan penghasilan yang layak, perjuangan peningkatan layanan publik, dan lain sebagainya (Fraser 2017, hlm. 35). Reproduksi sosial dapat merujuk pada tiga aspek, yaitu: (1) reproduksi biologis orang-orang, termasuk kehamilan, menyusui; (2) reproduksi tenaga

kerja yang tidak hanya melibatkan kerja subsisten, tetapi juga pendidikan dan pelatihan; (3) reproduksi layanan sosial dan kebutuhan perawatan, baik yang diprivatisasi dalam keluarga maupun di luar rumah tangga, atau kombinasi keduanya (Bakker & Gill 2003, hlm. 32). Selain itu, reproduksi sosial juga mencakup institusi-institusi, proses-proses, dan relasi sosial yang terkait dengan pembentukan dan pemeliharaan komunitas, yang merupakan tumpuan dari produksi dan pertukaran (Bakker 1999). Reproduksi sosial juga menjadi konsep yang produktif dalam melihat keterhubungan antara kehidupan sehari-hari dengan aspek ekonomi global yang lebih luas (Elias & Rai 2019). Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial, kerja perawatan dapat ditempatkan dalam lanskap sosial yang lebih luas (Kofman 2012).

Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial sebagai lensa analisa, batasan antara produksi dan reproduksi dapat dipahami sebagai konstruksi sosial. Menurut para pemikir feminis, semua kerja bersifat produktif (Federici 2012). Selain itu, kerja produktif dan reproduktif dapat dilakukan secara bersamaan dan bukan sebagai alternatif atau sekuensial. Hal ini dapat dilihat dalam konteks sektor pertanian dan perkebunan (Gore & LeBaron 2019). Kerja subsisten di sektor pertanian pada umumnya dilihat sebagai kerja reproduktif yang terekam dalam sistem perhitungan pertumbuhan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan pertanian skala kecil, batasan antara produktif dan reproduktif dalam perkebunan agribisnis skala besar memang lebih terlihat. Meskipun demikian, batasan tersebut masih tetap relatif samar. Begitu pula dalam konteks perkebunan monokultur kelapa sawit skala besar yang tidak memiliki pemisahan antara ruang kerja dan ruang hidup. Dengan demikian, kerja perawatan perlu dipahami secara lebih luas.

Selain tidak adanya pemisahan antara ruang kerja dan ruang hidup yang membutuhkan pemahaman kerja perawatan dalam arti yang lebih luas, perawatan dalam konteks perkebunan monokultur sawit juga dapat dihubungkan dengan salah satu kegiatan kerja perkebunan. Aktivitas kerja di perkebunan monokultur sawit pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu kerja pemanenan dan kerja perawatan. Kerja pemanenan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki karena ada anggapan bahwa aktivitas ini membutuhkan fisik yang lebih kuat. Kerja perawatan meliputi aktivitas perawatan pohon sawit mulai dari pemupukan, penyemprotan herbisida hingga pembersihan piringan. Pembagian kerja ini berbasis gender yang menyebabkan

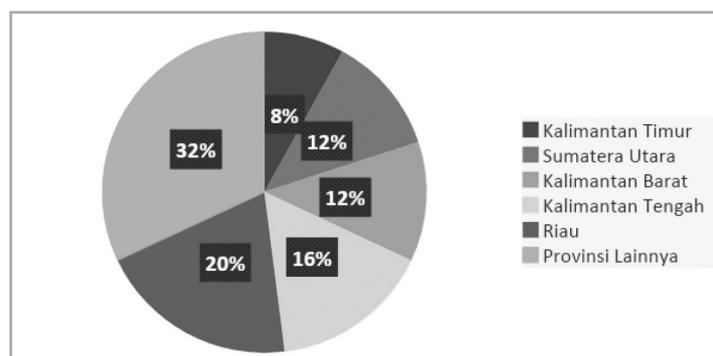
perempuan mendominasi kerja perawatan. Sebagai buruh perawatan perkebunan, buruh perempuan pada umumnya bekerja dengan status BHL karena adanya anggapan bahwa kerja perawatan perkebunan bukan merupakan kegiatan utama dalam aktivitas kerja di perkebunan. Hal ini menunjukkan konsep reproduksi sosial perlu dikaitkan dengan proses kerja dalam perkebunan monokultur kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan pemahaman dalam konsep reproduksi sosial bahwa batasan antara produksi dan reproduksi harus dipahami secara historis dan melibatkan transformasi proses-proses sosial, berbagai mekanisme dan institusi yang menjadi tumpuan masyarakat, produksi, dan kekuasaan (Bakker & Gill 2003). Selain itu, proses kerja dalam produksi memiliki dampak politis dan ideologis yang memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan (Burawoy 1985).

Menghubungkan konsep reproduksi sosial dengan proses kerja dalam perkebunan monokultur kelapa sawit juga membantu memahami dua hal. Pertama, pemahaman akan keseharian dalam perkebunan monokultur sawit dapat diperoleh apabila aspek produksi dan reproduksi dipahami sebagai dua relasi yang terintegrasi satu dengan yang lain. Kedua, menghubungkan konsep reproduksi sosial dengan proses kerja dapat membantu memahami kerja perawatan perkebunan dalam kerangka rezim perburuhan sebagai kerja perawatan. Rezim perburuhan mengacu kepada sekumpulan relasi-relasi sosial dan institusi yang membentuk buruh dan memengaruhi eksploitasi pada berbagai skala dan melalui berbagai bidang dalam jangkauan ekonomi global (Baglioni et al. 2022, hlm. 82). Pengertian ini tidak hanya menyoroti aspek sosial, tetapi juga aspek ekologis dari rezim perburuhan (Sinha 2023). Rezim perburuhan perkebunan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsentrasi dan kekuasaan industri agribisnis skala besar, khususnya kecenderungan perkebunan

monokultur skala besar yang diikuti oleh penekanan pada kebijakan modernisasi pertanian, yang melibatkan penggunaan teknologi intensif, bibit dengan hasil tinggi, dan bahan kimia pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Bahan kimia pertanian mengandung racun dan para buruh perkebunan terpapar racun tersebut. Terkait penggunaan racun yang cukup intens dalam sektor pertanian modern, kritik para pemikir di bidang lingkungan mengenai merajalelanya penggunaan racun dalam kehidupan modern menggarisbawahi bahwa kerja adalah cerminan dari penduniaan yang beracun, Tubuh yang bekerja tidak hanya menjadi sebuah mekanisme penduniaan yang beracun, tetapi juga menjadi dunia yang beracun itu sendiri (Nading 2020). Dalam konteks ini, diperkenalkan istilah perawatan yang beracun, yang berusaha memahami perawatan dalam lingkup merajalelanya penggunaan racun dalam kehidupan sehari-hari.

Perkebunan Kelapa Sawit di Sambas, Kalimantan Barat

Sejak tahun 2007, Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2021, luas perkebunan sawit di Kalimantan Barat mencapai 1.829.533 hektare (Badan Pusat Statistik 2022). Gambar 5 menunjukkan kontribusi Provinsi Kalimantan Barat terhadap produksi minyak sawit mentah nasional. Sementara pada tahun 2022, luas perkebunan sawit di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mencapai 81.743 hektare, yang mengalami kenaikan dari 68.676 hektare pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2023a). Pada tahun 2022, produksi minyak sawit dari perkebunan skala besar di Kabupaten Sambas mencapai 272.850 ton (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2023b). Berbagai studi telah mengangkat perubahan lanskap akibat ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Sambas (Milieudefensie 2018; Nurhidayah et al. 2015).



Gambar 5. Produksi Minyak Sawit Mentah Berdasarkan Provinsi Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Sambas dengan sawit sebagai komoditi pertanian yang semakin penting perannya di samping beras, sayur-sayuran, dan karet (Supriadi 2013). Pentingnya peranan sawit sebagai komoditi pertanian di Kabupaten Sambas juga membawa dampak terhadap proses produksi komoditi, yang juga menunjukkan perubahan lanskap pertanian akibat ekspansi perkebunan sawit (Morgan 2017). Selain itu, ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Sambas mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal, memicu konflik lahan (de Vos 2016), termasuk protes dari para perempuan lokal (Morgan 2017). Sebuah studi menunjukkan dampak-dampak gender dari ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Sambas (De Vos & Delabre 2018).

Buruh Perawatan Perkebunan dan Reproduksi Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit

Buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT A, B, C, dan D melakukan kerja perawatan perkebunan baik pemupukan maupun penyemprotan pestisida. Buruh perempuan di PT A, B, dan C berstatus sebagai BHL. Akibat status mereka sebagai BHL, buruh perempuan tidak memiliki akses terhadap hak-hak perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti hak cuti, termasuk cuti haid dan cuti melahirkan. Dalam konteks ekonomi perawatan, hak-hak ini merupakan bagian dari kebijakan dan layanan perawatan. Ketiadaan akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan ini menunjukkan belum adanya pengakuan (*recognition*) terhadap kebutuhan perawatan buruh perempuan.

Salah satu buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT B menjelaskan bagaimana dirinya harus bekerja hingga usia kehamilan delapan bulan dan kemudian berhenti bekerja hingga bayinya berusia tiga bulan (Ibu A 2023, Wawancara 20 Januari). Selama periode tidak bekerja ini, ia tidak dibayar oleh perusahaan. Selain ketiadaan akses terhadap cuti, para buruh perempuan bagian perawatan perkebunan ini tidak memiliki akses terhadap asuransi yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Para buruh perempuan ini juga tidak ikut serta dalam asuransi kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Para buruh perempuan bagian perawatan perkebunan yang berstatus BHL ini juga memiliki kesulitan dalam mengakses Alat Pelindung Diri (APD). Di PT A, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan

tidak disediakan APD oleh perusahaan perkebunan sehingga mereka harus membeli sendiri. Di PT B, APD disediakan oleh perusahaan hanya sekali dalam setahun. Berdasarkan diskusi kelompok, terfokus dengan buruh perempuan di PT ini (FGD 2023, 20 Januari), APD biasanya sudah rusak setelah tiga bulan. Sementara buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C tidak menggunakan apron, melainkan hanya menggunakan masker dan sarung tangan ketika melakukan pemupukan. APD disediakan oleh perusahaan di masa lalu, sementara saat ini tidak lagi karena alasan efisiensi.

Sementara buruh perempuan bagian perawatan di PT D berstatus Buruh Harian Tetap (BHT). Istilah BHT yang digunakan oleh perusahaan menimbulkan kerancuan mengenai status kerja para buruh perempuan. Menurut para buruh perempuan, status ini menunjukkan status mereka yang sudah “tetap”. Meski demikian, para buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT ini tetap dibayar dengan berdasarkan Hari Kerja (HK). Seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, Hari Kerja merupakan komponen penentu berapa besar penghasilan yang diterima oleh buruh perempuan. Hanya saja, tidak seperti BHL yang tidak dibayarkan HK-nya ketika tanggal merah atau hari libur, buruh perempuan yang berstatus BHT di PT D tetap mendapatkan HK pada hari libur. Berdasarkan wawancara dengan buruh perempuan di PT D, perbedaan yang mereka rasakan setelah diangkat menjadi buruh “tetap” adalah akses yang mereka miliki terhadap hak cuti dan BPJS. Selebihnya, mereka tetap dibayar berdasarkan perhitungan HK. Meski demikian, beberapa buruh perempuan mengaku belum dapat mengakses cuti haid. Berdasarkan diskusi kelompok terfokus dengan para buruh perempuan di PT D tidak ada kesulitan dalam mengakses APD. Ketika APD rusak, buruh perempuan dapat meminta kepada perusahaan (FGD 2023, 11 Juli).

Mengenai isu upah, para buruh perempuan bagian perawatan perkebunan, baik yang berstatus BHL maupun BHT, dibayar berdasarkan HK. HK merupakan satuan hari kerja dengan nilai nominal tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Nilai nominal tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah HK yang dimiliki oleh buruh perempuan dalam sebulan. Penggunaan HK sebagai dasar perhitungan upah buruh perempuan menunjukkan penekanan terhadap aspek produktivitas buruh. Tabel 1 menunjukkan jumlah penghasilan yang diterima oleh buruh perempuan bagian perawatan perkebunan dan perbandingannya dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sambas. Berdasarkan

Tabel 1, dapat dilihat bahwa penghasilan yang diterima buruh perempuan bagian perawatan perkebunan masih di bawah UMK. Perhitungan penghasilan pada Tabel 1 menggunakan asumsi buruh perempuan memiliki HK 5 hari dalam seminggu. Sementara pada saat wawancara dan diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C, para buruh baru saja mendapat informasi dari perusahaan bahwa jumlah HK mereka

dikurangi menjadi 4 hari dalam seminggu disebabkan oleh produksi yang menurun. Ini berarti bahwa buruh perempuan menerima penghasilan bahkan lebih rendah dari perhitungan di Tabel 1. Menurut buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT B, upah mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber penghidupan yang tidak layak ini menunjukkan belum adanya pengakuan (*recognition*) terhadap kebutuhan perawatan buruh perempuan.

Tabel 1. Perbandingan Tarif HK dan Penghasilan Buruh Perempuan Bagian Perawatan Perkebunan

	PT A	PT B	PT C	PT D
Tarif HK	Rp 111.700	Rp 111.000	Rp 108.000	Rp 111.700
Jumlah Penghasilan dalam sebulan*	Rp2.234.000	Rp2.220.000	Rp2.160.000	Rp2.234.000
UMK Kabupaten Sambas tahun 2023	Rp2.792.599,31			

Sumber: hasil wawancara yang diolah oleh penulis

Catatan *: Asumsi jumlah HK yang dimiliki oleh buruh perempuan bagian perawatan kebun sawit adalah lima hari dalam seminggu sehingga, total HK yang dimiliki sebulan adalah 20.

Terkait isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), buruh perempuan bagian perawatan perkebunan terpapar racun dari bahan kimia yang terdapat dalam pupuk dan herbisida setiap kali mereka melakukan kerja perawatan perkebunan. Dengan demikian, akses terhadap APD adalah hal yang penting bagi kesehatan buruh perempuan bagian perawatan perkebunan. Berdasarkan penjelasan paragraf awal pada bagian ini, hanya PT D yang memberikan kemudahan akses terhadap APD. Sementara ketiga perkebunan lain, ketika buruh perempuan masih berstatus sebagai BHL, maka mereka tidak memiliki akses terhadap APD. Implikasinya, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan mengalami berbagai dampak dari paparan racun tersebut. Buruh perempuan bagian pemupukan di PT A melaporkan sesak napas yang dialami setelah bekerja. Salah satu buruh perempuan di PT tersebut juga menunjukkan kuku tangannya yang menghitam akibat pemupukan (Ibu W 2023, Wawancara 19 Januari). Selain sesak napas, buruh perempuan bagian penyemprotan di PT B melaporkan gatal-gatal pada kulit. Dampak kesehatan yang sama juga dialami oleh buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C. Salah satu buruh perempuan di PT ini bahkan melaporkan pernah mengalami pusing yang berdarah setelah menyemprot (Ibu L 2023, Wawancara 20 Januari). Gatal-gatal pada kulit juga dilaporkan oleh buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT

D (FGD 2023, 13 Juli). Meski perusahaan menyediakan akses terhadap APD, dampak kesehatan tetap dirasakan. Kegunaan APD memang bukan untuk menghilangkan paparan racun, melainkan meminimalisir paparan. Di sisi lain, penggunaan APD kerap menyulitkan buruh perempuan dalam melakukan aktivitas kerjanya. Penggunaan APD lengkap di tengah kebun sawit yang panas dapat menghambat kerja di perkebunan. Buruh perempuan dihadapkan pada pilihan antara perlindungan kesehatan atau pencapaian target kerja.

Selain paparan racun kimia, masalah kesehatan lain yang dialami oleh buruh perempuan bagian perawatan perkebunan berhubungan dengan kegiatan kerja yang secara berulang dilakukan. Salah satu buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT A meminta pensiun dini karena sakit kaki dan merasa kesulitan untuk bekerja akibat penyakit tersebut (Ibu M 2023, Wawancara 19 Januari). Perkebunan sawit PT A dan PT B berada pada lahan gambut dengan struktur tanah yang tidak sekokoh tanah biasa, khususnya pada musim hujan. Hal ini menyebabkan buruh perempuan membutuhkan tenaga ekstra dalam berjalan dan bergerak di sekitar wilayah perkebunan. Selain sakit kaki, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT D mengeluhkan sakit pinggang (FGD 2023, 11 Juli). Baik buruh perempuan yang melakukan pemupukan maupun penyemprotan harus menanggung beban yang cukup berat. Buruh perempuan yang melakukan pemupukan di PT D harus menggendong ember berisi

pupuk yang beratnya antara 12,5 kilogram hingga 25 kilogram yang dilakukan secara berulang selama 5 kali dalam sehari. Sementara buruh perempuan yang melakukan kegiatan penyemprotan di PT yang sama harus memanggul kep seberat 12 liter secara berulang dengan pengisian kep sebanyak 12 hingga 13 kali pengisian.

Meski terdapat berbagai persoalan kesehatan dan keselamatan kerja, tidak semua perkebunan memiliki klinik. Dari keempat perkebunan kelapa sawit monokultur yang menjadi studi kasus penelitian ini, hanya dua perkebunan, yaitu PT A dan PT D yang menyediakan klinik kesehatan. Meski demikian, baik klinik PT A maupun klinik PT B tidak memiliki ketersediaan obat-obatan yang lengkap. PT B tidak menyediakan klinik di kebun. Dengan alasan berada dalam satu manajemen dan berlokasi tidak jauh dari perkebunan. PT B menganjurkan buruh perkebunan untuk berobat ke klinik di PT A. Dibandingkan ke klinik di PT A, para buruh perempuan perkebunan PT B lebih memilih untuk berobat keluar. Hanya saja, buruh harus meminta izin dari mandor. Sementara di PT C, klinik sudah tidak disediakan lagi oleh perusahaan.

Tanggung jawab para buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di dalam reproduksi sosial perkebunan mencakup antara lain kerja domestik dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Karena menerima upah yang rendah, seperti ditunjukkan oleh Tabel 1. Para buruh perempuan mengandalkan alternatif lain agar kebutuhan pangan keluarga tercukupi, misalnya mengandalkan tumbuhan dan sayuran yang tumbuh di sekitar perkebunan. Sembari melakukan kerja perawatan perkebunan, buruh perempuan mengumpulkan tumbuhan atau sayuran yang mereka temui untuk kemudian dibawa pulang dan dimasak. Salah satu buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C mengungkapkan bahwa berjualan makanan merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (FGD 2023, 20 Januari). Sementara untuk berjualan kue membutuhkan modal yang lebih besar sehingga pilihan ini tidak menjadi pilihan utama bagi para buruh perempuan. Beberapa buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT D mengelola kebun pangan di pekarangan rumah. Meski demikian, buruh perempuan di PT ini menghadapi kemungkinan tumbuhan di kebun pangannya ditebas oleh perusahaan. Peraturan mengenai tumbuhan yang diperbolehkan selalu berubah-ubah seiring dengan pergantian manajemen.

Isu air merupakan satu aspek yang penting dalam reproduksi sosial di perkebunan sawit. Di PT A, sumber air para keluarga buruh untuk mandi dan kebersihan rumah tangga berasal dari sumur bor dan bukan berasal dari air sungai. Di perkebunan sawit pada umumnya terdapat dua jenis air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu air untuk mandi juga kebersihan dan air untuk minum. Air sumur atau air sungai merupakan sumber air yang digunakan untuk mandi dan kebersihan rumah tangga. Sementara, air galon digunakan sebagai sumber air minum. Meski tidak lagi mengandalkan air sungai, para buruh di PT A, termasuk buruh perempuan merasa khawatir dengan rencana dibangunnya pabrik kelapa sawit di sekitar perkebunan yang akan berakibat pada pencemaran air. Ketersediaan air juga penting untuk buruh perempuan bagian perawatan perkebunan yang melakukan kerja penyemprotan. Buruh perempuan bagian penyemprotan memerlukan air untuk mencampur herbisida dengan air. Selain itu, buruh perempuan bagian penyemprotan juga menggunakan air di parit dalam perkebunan untuk membersihkan badan mereka setelah bekerja sambil menunggu waktu pulang. Buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT B mengungkapkan bagaimana mereka mengalami kesulitan untuk mencari air di parit pada musim kemarau (FGD 2023, 20 Januari). Buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C bahkan terkadang harus mengendarai motor untuk dapat mencari parit yang berisi air.

Akses terhadap lahan merupakan hal yang sentral bagi reproduksi sosial buruh perempuan perkebunan. Bahkan sebelum menjadi buruh perkebunan, akses terhadap lahan merupakan sumber penghidupan bagi perempuan. Sebagian besar buruh perkebunan di PT A dan PT B berasal dari masyarakat di desa sekitar, yaitu Desa A. Awalnya, masuknya dua perkebunan tersebut pada tahun 2006 mendapatkan penolakan dari masyarakat desa tersebut, yang merupakan masyarakat Melayu Sambas. Salah satunya disebabkan oleh skema plasma yang tidak jelas. Berdasarkan skema yang ditawarkan kepada masyarakat Desa A, mereka harus memberikan lahan mereka dan kemudian akan menerima lahan perkebunan berdasarkan alokasi 70:30.

Berdasarkan FGD (2023), para buruh perkebunan tidak memahami arti alokasi 70:30 tersebut dan implikasinya. Para buruh perkebunan juga meragukan struktur keuangan dari skema plasma tersebut, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah mereka pada akhirnya akan mendapatkan lahan perkebunan

yang dijanjikan. Pada akhirnya, menurut masyarakat Desa A, skema plasma hanya membawa berbagai masalah. Salah satu buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT A mengungkapkan bahwa lahan plasma yang diterima keluarganya baru mulai ditanami sawit. Implikasinya, buruh perempuan harus bekerja sebagai buruh perkebunan di PT A. Sementara itu, PT C berlokasi di Desa C yang memiliki sejarah sebagai desa transmigrasi. Sejak awal masuknya perkebunan PT C pada tahun 1990, terdapat berbagai masalah, termasuk konflik terkait skema plasma dengan masyarakat adat Dayak Bekati (Jiwan & Colchester 2020). Para buruh perkebunan di PT C terdiri dari berbagai etnis yang berasal dari wilayah sekitar, seperti Melayu Sambas, Jawa (generasi kedua dari masyarakat transmigran) maupun buruh migran dari daerah lain, seperti dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara konflik terkait plasma juga terjadi di PT D. Pada tahun 2012, upaya penanaman kembali yang dilakukan oleh PT D menimbulkan konflik karena bersinggungan dengan lahan masyarakat sekitar yang berakhir dengan dikembalikannya lahan kepada masyarakat sekitar (Tempo 2018). Buruh perkebunan di PT D juga terdiri dari berbagai etnis, seperti Melayu Sambas, Jawa (generasi keluarga transmigran), dan Dayak.

Berdasarkan karakteristik buruh di keempat perkebunan, yang sebagian besar merupakan buruh lokal, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan fungsi lahan akibat ekspansi perkebunan sawit menyebabkan perempuan harus bekerja di perkebunan. Perubahan akses terhadap lahan ini memengaruhi posisi tawar perempuan. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana perubahan akses terhadap lahan ini memengaruhi posisi tawar perempuan. Meski demikian, buruh perempuan yang menjadi subyek penelitian ini merupakan anggota serikat buruh. Meskipun sebagian besar dari mereka memiliki status BHL, keanggotaan dalam serikat buruh paling tidak dapat meningkatkan daya tawar mereka dalam menghadapi perusahaan perkebunan.

Perawatan Beracun

Pemaparan tentang kondisi kerja buruh perempuan bagian perawatan perkebunan yang dibahas di bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana sebagian besar buruh perempuan bagian perawatan perkebunan dipekerjakan dalam rezim perburuhan yang fleksibel. Status mereka sebagai BHL memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan buruh perempuan pada saat dibutuhkan. Buruh perempuan bagian perawatan

perkebunan di PT A mengungkapkan bahwa ketika pandemi melanda, perusahaan mengurangi HK mereka menjadi dua hari dalam sebulan yang berlangsung selama tujuh bulan. Seperti yang dipaparkan di bagian sebelumnya, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT C juga mengalami pengurangan HK menjadi 4 hari dalam seminggu dengan alasan produksi yang menurun. Rezim kerja yang fleksibel ala *no work no pay* atau tidak bekerja maka tidak diupah memberikan gerak yang leluasa bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pengeluaran, khususnya pengeluaran yang terkait ketenagakerjaan.

Terkait rezim kerja fleksibel di perkebunan monokultur sawit, perusahaan pada umumnya menjadikan fleksibilitas sebagai sesuatu yang ditawarkan untuk menangkap potensi rekrutmen buruh perempuan. Dengan anggapan bahwa buruh perempuan juga memiliki tanggung jawab terhadap kerja perawatan di dalam rumah tangga buruh, rezim kerja yang fleksibel memungkinkan buruh perempuan untuk menyeimbangkan antara kerja ekonomi produktif di perkebunan dan kerja reproduktif dalam rumah tangga buruh. Selain itu, ada anggapan bahwa kerja perawatan perkebunan, yang sebagian besar dilakukan oleh buruh perempuan, adalah kerja penunjang dan bukan kerja utama di perkebunan monokultur sawit. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan status BHL dalam kerja perawatan perkebunan dan efisiensi yang dilakukan perusahaan perkebunan cenderung mengurangi HK para buruh BHL.

Perlu dipahami dalam konteks proses kerja dalam perkebunan monokultur bahwa rezim kerja perawatan perkebunan yang fleksibel, umumnya dilakukan oleh buruh perempuan. Karakteristik perkebunan monokultur memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang lebih cepat sembari menekan pengeluaran. Keuntungan yang ditawarkan oleh perkebunan monokultur dicapai dengan fokus terhadap produksi dan produktivitas perkebunan. Hal ini dicapai dengan penggunaan pupuk kimia dan herbisida. Penggunaan pupuk dan herbisida cukup menguras pengeluaran perusahaan karena harganya yang relatif mahal. Oleh karena itu, alternatif penekanan pengeluaran adalah melalui penerapan rezim kerja yang fleksibel. Melalui rezim kerja ini, perusahaan dapat membatasi pengeluaran karena perusahaan tidak perlu membayarkan gaji tetap, pesangon, dan pensiun, serta tidak perlu memberikan hak cuti, hak terkait kesehatan, dan keselamatan kerja. Menurut Tania Li (2017), relasi kerja yang fleksibel

dalam perkebunan sawit adalah salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan. Dengan cara demikian, biaya produksi minyak sawit dapat ditekan agar dapat berkompetisi dengan komoditi minyak nabati lainnya di pasar global. Dalam konteks pasar global minyak nabati, minyak sawit dipandang sebagai komoditi yang paling efisien dan paling kompetitif. Efisiensi dan daya saing komoditi minyak sawit dalam persaingan global ini bertumpu pada ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit.

Dari penjelasan di atas, kerja perawatan perkebunan dalam konteks perkebunan monokultur kelapa sawit dapat dipahami sebagai artikulasi dari kompetisi komoditi minyak sawit dalam pasar global dengan relasi sosial masyarakat, yaitu relasi yang berdasarkan sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kerja-kerja reproduktif. Kerja perawatan perkebunan dalam rezim kerja yang fleksibel di perkebunan sawit memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan suplai tenaga kerja murah, yaitu buruh perempuan. Literatur sejarah rezim perburuhan dan gender di perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa aspek kolonial dari rekrutmen buruh perempuan di perkebunan sawit, kemudian diteruskan dalam rezim perburuhan di perkebunan sawit kontemporer (Sinaga 2021). Dalam rezim perburuhan perkebunan kontemporer, pendekatan rekrutmen rumah tangga buruh memungkinkan adanya tambahan potensi tenaga kerja, yaitu buruh perempuan. Untuk memungkinkan buruh perempuan melakukan peran gandanya, rezim kerja yang fleksibel dianggap sebagai pilihan yang tepat. Dengan demikian, rekrutmen buruh perempuan bagian perawatan perkebunan dapat dianggap sebagai inklusi sekaligus eksklusif. Inklusi dalam arti bahwa perkebunan monokultur sawit menjadi penyedia lapangan kerja bagi buruh perempuan. Eksklusif dalam arti status kerja buruh perempuan sebagai BHL justru membatasi akses terhadap upah yang layak dan hak-hak ketenagakerjaan.

Dinamika relasi sosial yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari akses terhadap lahan sebagai sumber penghidupan. Ekspansi perkebunan sawit berdampak pada berkurangnya akses terhadap lahan. Skema plasma yang ditawarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor perkebunan sawit skala kecil, justru menimbulkan permasalahan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, keempat perkebunan yang menjadi studi kasus artikel ini menghadapi masalah konflik lahan terkait dengan skema plasma. Terhambatnya akses terhadap lahan

akibat konflik terkait skema plasma dapat memengaruhi rezim perburuhan perkebunan. Seperti yang diceritakan oleh salah satu buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT A, bekerja sebagai BHL di perusahaan tersebut dilakukan karena keluarganya baru saja mendapat lahan plasma yang belum dapat menghasilkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, anggapan bahwa kerja perawatan perkebunan sebagai kerja penunjang menjadi alasan perusahaan dalam menerapkan rezim perkebunan yang fleksibel. Padahal kerja perawatan perkebunan dilakukan secara teratur. Akibatnya, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan dapat dipekerjakan sebagai BHL selama bertahun-tahun. Misalnya, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan di PT A sudah bekerja sebagai BHL semenjak perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2006.

Berdasarkan FGD, ada beberapa buruh bagian perawatan perkebunan berstatus BHL yang sudah diangkat menjadi SKU karena proses pengangkatan sebelumnya dianggap lebih mudah. Meski demikian, buruh bagian perawatan masih didominasi oleh BHL. Sementara di PTC, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan telah bekerja sebagai BHL selama dua hingga lima tahun. Di PT D, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan diangkat sebagai BHT setelah bekerja selama 10 hingga 15 tahun. Pandangan kerja perawatan perkebunan sebagai kerja penunjang dan perempuan yang lebih cocok untuk melakukan kerja penunjang tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh persepsi sosial masyarakat yang bias gender. Di samping itu, sesuai dengan pandangan Burawoy (1985) yang berpandangan bahwa proses kerja memiliki dampak politis dan ideologis, kerja perawatan perkebunan yang dilakukan buruh perempuan juga memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Hal ini semakin menunjukkan bagaimana aspek kerja produktif bertindak sekaligus sebagai reproduksi sosial suatu sistem sosial tertentu.

Dalam paparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa inklusi dalam perkebunan kelapa sawit dipahami dalam hal penyediaan lapangan kerja perkebunan kepada buruh perempuan. Di sisi lain, buruh perempuan bekerja di perkebunan sebagai salah satu cara untuk menambah penghasilan keluarga. Seperti yang ditunjukkan oleh literatur mengenai dampak gender dari ekspansi perkebunan sawit, berkurangnya akses perempuan terhadap tanah, hutan, dan sumber penghidupan lainnya mengakibatkan perempuan

terpaksa bekerja sebagai buruh di perkebunan. Ini berarti bahwa partisipasi buruh perempuan dalam perkebunan monokultur sawit sebagai strategi untuk penghidupan. Dalam dinamika gender yang dibangun dalam sistem patriarki, strategi ini diambil oleh buruh perempuan dengan dilandasi oleh aspirasi perawatan rumah tangga. Kebutuhan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga adalah salah satu cerminan aspirasi perawatan (*care*).

Dengan demikian, peran perempuan dalam reproduksi sosial tidak hanya dipahami sebatas peran perempuan dalam kerja perawatan dalam rumah tangga buruh, tetapi juga dalam hal kerja buruh perempuan di bagian perawatan perkebunan. Lebih lanjut, buruh perempuan bagian perawatan perkebunan yang melakukan pekerjaannya dengan risiko terpapar racun kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat dipahami sebagai perawatan yang beracun. Hal ini menunjukkan hubungan antara reproduksi sosial dan perkebunan monokultur kelapa sawit yang berlandaskan paradigma modernisasi pertanian. Seperti yang telah dijelaskan di bagian tiga, paradigma modernisasi pertanian mengakibatkan penggunaan bahan kimia perkebunan yang dalam perkembangannya semakin merajalela seiring dengan hasrat untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan perkebunan. Sementara, peran perempuan dalam reproduksi sosial rumah tangga buruh memengaruhi pilihan mereka untuk berpartisipasi dalam kerja perkebunan sebagai strategi penghidupan.

Sebagai buruh perkebunan bagian perawatan perkebunan, buruh perempuan melakukan kerja perawatan dalam dua aspek yang saling berkelindan. Aspek pertama merujuk pada kerja perawatan perkebunan (*maintenance work*) yang berkontribusi pada produksi, keuntungan, dan ekspansi perkebunan monokultur sawit. Penekanan pengeluaran ketenagakerjaan melalui penerapan rezim perburuhan perkebunan yang fleksibel tidak hanya meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar global, tetapi juga dapat membantu perluasan ekspansi perkebunan monokultur kelapa sawit. Aspek kedua merujuk pada kerja perawatan (*care work*) rumah tangga perkebunan yang dilakukan buruh perempuan. Aspek ini mencerminkan reproduksi sosial rumah tangga buruh. Dengan menggunakan lensa analitis reproduksi sosial, kerja perawatan dalam dua aspek ini dipahami dalam arti yang lebih luas. Aspek pertama, menunjukkan bahwa kerja perawatan perkebunan dipahami

sebagai reproduksi sosial sebuah sistem sosial, yaitu sistem perkebunan monokultur kelapa sawit. Aspek kedua, kerja perawatan dipahami sebagai reproduksi sosial rumah tangga buruh. Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial, pemahaman yang lebih luas mengenai kerja perawatan rumah tangga buruh tidak hanya terjadi di dalam rumah. Ketika buruh perempuan mengumpulkan tumbuhan dan sayur-sayuran di sekitar perkebunan sebagai salah satu sumber pangan, hal ini juga mencerminkan kerja perawatan rumah tangga buruh. Selain itu, aspek pertama dan aspek kedua berkelindan dan mencerminkan kontradiksi dalam reproduksi sosial. Aspek pertama menunjukkan hasrat untuk mencari keuntungan, sementara aspek kedua menunjukkan hasrat untuk memproduksi hidup (*life-making*) (Bhattacharya 2017).

Dalam konteks perkebunan sawit monokultur, perawatan yang beracun juga dapat mencerminkan pengalihan atau eksternalisasi biaya-biaya yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kepada buruh perempuan dan lingkungan. Buruh perempuan bagian perawatan perkebunan bertanggung jawab untuk melakukan kerja reproduktif yang tidak dibayar. Reproduksi buruh dalam rumah tangga buruh dimungkinkan oleh kerja reproduktif tersebut. Hal ini mencerminkan eksternalisasi biaya oleh perusahaan. Selain itu, penggunaan bahan kimia perkebunan yang beracun sebenarnya berdampak negatif baik terhadap buruh perempuan maupun terhadap lingkungan sekitar perkebunan. Buruh perempuan bagian perawatan di PT B harus menggunakan air parit perkebunan, baik sebagai bahan campuran herbisida maupun untuk membersihkan tubuhnya. Alasannya, perusahaan tidak menyediakan air sebagai bahan campuran herbisida. Hal ini merupakan salah satu bentuk eksternalisasi biaya oleh perusahaan. Ketika membersihkan tubuh mereka dengan air setelah melakukan kerja penyemprotan, buruh perempuan bagian perawatan di PT B menyadari bahwa mereka, "membersihkan racun dengan racun" (Ibu A 2023, Wawancara 20 Januari). Sebuah laporan penelitian (Kinasih, akan terbit) tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perkebunan sawit mengungkapkan bagaimana durasi kerja yang panjang dari buruh yang bekerja dengan bahan kimia menunjukkan keterlibatan bahan kimia dalam keseharian buruh, yang ditunjukkan dalam ekspresi "hidup bersama racun". Akses buruh perempuan bagian perawatan perkebunan yang terbatas baik terhadap APD, alat kerja, alat transportasi maupun terhadap hak-hak atas cuti, dan K3 menambah daftar biaya yang

dieksternalisasi perusahaan. Lebih lanjut, polusi air akibat limbah pabrik kelapa sawit juga menunjukkan eksternalisasi biaya lingkungan oleh perusahaan, yang kemudian harus ditanggung oleh buruh perkebunan dan masyarakat sekitar.

Penutup

Kerja perawatan yang merupakan fokus dari ekonomi perawatan, perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Konsep reproduksi sosial menawarkan pendekatan yang dapat membantu memahami kelindan antara aspek produktif dan reproduktif. Dengan menggunakan konsep reproduksi sosial sebagai lensa analitis, partisipasi buruh perempuan dalam kerja perawatan perkebunan di perkebunan monokultur sawit menunjukkan artikulasi relasi sosial masyarakat yang berlandaskan sistem patriarki dengan kompetisi minyak sawit dalam pasar minyak nabati global. Corak perkebunan monokultur yang cenderung berupaya menekan pengeluaran bertemu dengan relasi gender yang timpang. Hal ini tercermin dalam adanya pembagian kerja berbasis gender yang cenderung menempatkan buruh laki-laki untuk bekerja di bagian pemanenan dan buruh perempuan di bagian perawatan perkebunan. Kerja perawatan perkebunan sawit juga dipandang sebagai kerja penunjang sehingga membenarkan penerapan rezim perburuhan yang fleksibel pada buruh perempuan bagian perawatan perkebunan.

Selain karena anggapan sebagai kerja penunjang, penerapan rezim perburuhan yang fleksibel di bagian perawatan perkebunan juga dilakukan untuk memastikan buruh perempuan menjalankan peran gandanya, yaitu peran dalam kerja produktif perkebunan dan peran dalam kerja reproduktif rumah tangga buruh. Jika mengacu pada Konvensi ILO Nomor 156 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, buruh perempuan perkebunan memang memiliki kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi perkebunan. Meski demikian, fleksibilisasi kerja perawatan perkebunan menunjukkan bagaimana buruh perempuan perkebunan mengalami diskriminasi. Karena fleksibilisasi kerja perawatan perkebunan menyulitkan buruh perempuan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak maternitas, maka ini tidak sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 183 tentang Perlindungan Maternitas.

Sementara dari sisi buruh perempuan, partisipasi dalam kerja perawatan perkebunan dipandang sebagai

suatu strategi untuk penghidupan. Hal ini dikarenakan peran buruh perempuan dalam reproduksi sosial rumah tangga buruh. Strategi untuk menjamin reproduksi sosial rumah tangga buruh diambil oleh buruh perempuan berdasarkan aspirasi perawatan rumah tangga. Dengan demikian, peran perempuan dalam reproduksi sosial tidak hanya dipahami sebatas peran perempuan dalam kerja perawatan dalam rumah tangga buruh, tetapi juga dalam hal kerja ekonomi produktif buruh perempuan di perkebunan, yaitu kerja perawatan perkebunan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam reproduksi sosial. Meski demikian, peran perempuan dalam reproduksi sosial belum mendapat pengakuan (*recognition*). Buruh perempuan yang mengambil bagian perawatan perkebunan dengan risiko terpapar racun kimia secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat dipahami sebagai perawatan yang beracun.

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang berfokus pada aspek perburuhan dan gender dalam perkebunan kelapa sawit. Isu interseksionalitas, dalam hal persinggungan antara aspek perburuhan, gender, dan relasi sosial lainnya tidak dibahas dalam artikel ini. Penulis merekomendasikan penelitian yang menggunakan pendekatan interseksionalitas tentang ekonomi perawatan dalam perkebunan sawit. Selain itu, akses terhadap lahan merupakan hal yang sentral dalam reproduksi sosial di konteks perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini memiliki batasan dalam pembahasan yang mendalam mengenai hubungan antara relasi tenurial dan rezim perburuhan perkebunan, terutama dalam hal dinamika gendernya. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya dilakukan studi yang mengkaji secara mendalam dinamika gender dalam nexus lahan dan perburuhan dalam konteks reproduksi sosial perkebunan monokultur kelapa sawit. Selain itu, isu reproduksi sosial dapat menjadi pintu masuk untuk merajut keterhubungan berbagai isu sosial-ekologis yang melampaui kerja perawatan dalam perkebunan monokultur kelapa sawit. Merajut keterhubungan ini penting tidak hanya dalam membangun solidaritas lintas isu di antara berbagai organisasi masyarakat termasuk serikat buruh, tetapi juga untuk merancang transformasi perkebunan kelapa sawit monokultur yang memiliki perspektif sosial-ekologis (Pye 2021). Oleh karena itu, penulis juga menyarankan perlunya dilakukan penelitian yang berupaya memahami bagaimana organisasi sosial masyarakat, khususnya serikat buruh perkebunan menggunakan isu reproduksi sosial untuk membangun jaringan solidaritas dengan berbagai gerakan sosial lainnya.

Daftar Pustaka

- Alonso-Fradejas, A., Liu, J., Salerno, T., & Xu, Y. 2016. "Inquiring into the Political Economy of Oil Palm as a Global Flex Crop", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 43(1), hlm. 141–165. <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1052801>.
- Assalam, R. & Parsaoran, H. 2018. *Keuntungan di Atas Keringat Buruh: Kondisi Kerja di Bawah Rantai Pasok Perkebunan Sawit Milik Sinar Mas*. Asian Monitor Research Centre dan Sawit Watch: Hongkong.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2023. "Luas Tanaman Perkebunan Besar", diakses pada 17 November 2023, di <https://kalbar.bps.go.id/indicator/161/248/1/luas-tanaman-perkebunan-besar.html>.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2023. "Produksi Perkebunan Besar", diakses pada 17 November 2023, di <https://kalbar.bps.go.id/indicator/161/249/1/produksi-perkebunan-besar.html>.
- Bakker, I. & Gill, S. 2003. "Ontology, Method, and Hypotheses", dalam Isabella Bakker & Stephen Gill (Eds.), *Power, Production, and Social Reproduction: Human In/Security in Global Political Economy*. Palgrave MacMillan: New York.
- Bakker, I. 1999. "Neoliberal Governance and the New Gender Orders", *Power, Production and Social Reproduction*, hlm. 66–82. https://doi.org/10.1057/9780230522404_4.
- Baglioni, E., Campling, L., Mezzadri, A., Miyamura, S., Pattenden, J., & Selwyn, B. 2020. "Exploitation and Labour Regimes: Production, Circulation, Social Reproduction, Ecology", dalam Baglioni, E., Campling, L., Coe, N. M., & Smith, A (Eds.), *Labour Regimes and Global Production*. Agenda Publishing: Newcastle.
- Bhattacharya, T. 2017. "Introduction: Mapping Social Reproduction Theory", dalam Bhattacharya, T. (Ed.), *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentring Oppression*. Pluto Press: London.
- Bedford, K. & Rai, S. M. 2010. "Feminists Theorize International Political Economy", *Signs*, Vol. 36(1), hlm. 1–18. <https://doi.org/10.1086/652910>.
- Burawoy, M. 1985. *The Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism*. Verso: London.
- Center for International Forestry Research (CIFOR). 2017. "Transforming the Roundtable on Sustainable Palm Oil for greater gender equality and women's empowerment", *CIFOR Info Brief*, diakses pada 17 November 2023, di https://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6383-infobrief.pdf.
- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia- Implications for Local Communities and Indigenous People*. Forest People Programme and Perkumpulan Sawit Watch.
- De Vos, R. 2016. "Multi-functional Lands Facing Oil Palm Monocultures: A Case Study of a Land Conflict in West Kalimantan, Indonesia", *ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 9(1), hlm. 11–32. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2016.1-2>.
- De Vos, R. & Delabre, I. 2018. "Spaces for Participation and Resistance: Gendered Experiences of Oil Palm Plantation Development", *Geoforum*, Vol. 96, hlm. 217–226. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.08.011>.
- Dharmawan, A. H., Mardiyarningsih, D. I., Komarudin, H., Ghazoul, J., Pacheco, P., & Rahmadian, F. 2020. "Dynamics of Rural Economy: A Socio-Economic Understanding of Oil Palm Expansion and Landscape Changes in East Kalimantan, Indonesia", *Land*, Vol. 9(7), hlm. 213. <https://doi.org/10.3390/land9070213>.
- Dib, J. B., Krishna, V. V., Alamsyah, Z., & Qaim, M. 2018. "Land-use Change and Livelihoods of Non-farm Households: The role of Income from Employment in Oil Palm and Rubber in Rural Indonesia", *Land Use Policy*, Vol. 76, hlm. 828–838. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.020>.
- Elias, J. & Rai, S. M. 2019. "Feminist Everyday Political Economy: Space, Time, and Violence", *Review of International Studies*, Vol. 45(2), hlm. 201–220. <https://doi.org/10.1017/S0260210518000323>.
- Eliza, P. 2021. *Peran Buruh Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus di Desa Ujong Krueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya*. UIN Ar-Raniry: Aceh.
- England, P. 2005. "Gender Inequality in Labor Markets: The Role of Motherhood and Segregation", *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, Vol. 12(2), hlm. 264–288. <https://doi.org/10.1093/sp/jxi014>.
- Fatchiya, A., Sulistyawati, A., Fredian, T., Siwi, M., Adisantoso, J., Budiarto, T., & Prasetyo, K. 2022. "Karakteristik Sosiodemografis dan Ketenagakerjaan Perempuan di Perkebunan Sawit, Provinsi Lampung", *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 18(1), hlm. 155–163. <https://doi.org/10.25015/18202236894>.
- Federici, S. 2012. *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction and Feminist Struggle*. Autonomedia: New York.
- Folbre, N. 1995. "Holding Hands at Midnight: The Paradox of Caring Labor", *Feminist Economics*, Vol. 1(1), hlm. 73–92. <https://doi.org/10.1080/714042215>.
- Folbre, N. 2006. "Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy", *Journal of Human Development*, Vol. 7(2), hlm. 183–199. <https://doi.org/10.1080/14649880600768512>.
- Fraser, N. 2017. "Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of Contemporary Capitalism", dalam Bhattacharya, T (Ed.), *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentring Oppression*. Pluto Press: London.
- Gore, E. & LeBaron, G. 2019. "Using Social Reproduction Theory to Understand Unfree Labour", *Capital and Class*, Vol. 43(4), hlm. 1–20. <https://doi.org/10.1177/030981681988807>.
- International Labour Organization (ILO). Konvensi ILO No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja yang Memiliki Tanggung Jawab Keluarga.
- International Labour Organization (ILO). Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas.
- Jiwan, N. & Colchester, M. 2020. "Kota Transmigrasi dan Orang Dayak Bekati", *Pengarahan*, diakses pada 17 November 2023, di <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Transmigration%20Townships%20BAH%20v2.pdf>.
- Julia & White, B. 2012. "Gendered Experiences of Dispossession: Oil

- Palm Expansion in a Dayak Hibun Community in West Kalimantan", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 39 (3--4), hlm. 995--1016. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.676544>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2021. "Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional: Analisis Pembangunan Industri", kemenperin.go.id, diakses pada 17 November 2023, di <https://www.kemenperin.go.id/download/28310>.
- Kinasih, S. R. Akan Terbit. "Menjalar dalam Diam: Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perkebunan Sawit", *Transnational Palm Oil Labour Solidarity*.
- Kofman, E. 2012. "Rethinking Care through Social Reproduction: Articulating Circuits of Migration", *Social Politics*, Vol. 19(1), hlm. 142--162. <https://doi.org/10.1093/sp/jxr030>.
- Li, T. M. 2017. "The Price of Un/Freedom: Indonesia's Colonial and Contemporary Plantation Regimes", *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 59(2), hlm. 245-276. <https://doi.org/10.1017/S0010417517000044>.
- Luxton, M. 2006. "Feminist Political Economy in Canada and the Politics of Social Reproduction", dalam Bezanson, K. & Luxton, M (Eds.), *Social Reproduction: Feminist Political Economy Challenges Neoliberalism*. McGill-Queen's University Press: Montreal.
- Mezzadri, A., Newman, S., & Stevano, S. 2021. "Feminist Global Political Economies of Work and Social Reproduction", *Review of International Political Economy*, Vol. 29(6), hlm. 1783--1803. <https://doi.org/10.1080/09692290.2021.1957977>.
- Milieudefensie. 2018. "Draw the Line: A Black Book about the Shady Investments of Dutch Banks into Palm Oil", milieudefensie.nl, diakses pada 17 November 2023, di <https://milieudefensie.nl/actueel/draw-the-line-english.pdf>.
- Morgan, M. 2017. "Women, Gender and Protest: Contesting Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 44(6), hlm. 1177--1196. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1300579>.
- Muttaqien, W., Ramdhaningrum, H., Aidha, C. N., Armintasari, F., & Ningrum, D. A. 2021. "Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan Sawit: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah", *The Prakarsa*, diakses pada 17 November 2023, di <https://theprakarsa.org/pelanggaran-hak-buruh-perkebunan-sawit-studi-kasus-di-kalimantan-barat-dan-sulawesi-tengah/>.
- Nading, A. M. 2020. "Living in A Toxic World", *The Annual Review of Anthropology*, Vol. 49, hlm. 209--224. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-010220-074557>.
- Nurhidayah, Y., Lovadi, I. & Linda, R. 2015. "Tumbuhan Berpotensi Bahan Pangan di Desa Sebangun Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas", *Probiot*, Vol. 4(1), hlm. 151--159. <http://dx.doi.org/10.26418/protobiont.v4i1.9684>.
- Pye, O. 2021. "Agrarian Marxism and the Proletariat: A Palm Oil Manifesto", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 48(4), hlm. 807--826. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1667772>.
- Rao, S. & Akram-Lodhi, A. H. 2021. "Feminist Political Economy", dalam Berik, G. & Kongar, E (Eds.), *Routledge Handbook of Feminist Economics*. Routledge: London.
- Richter, B. 2009. "Environmental Challenges and the Controversy about Palm Oil Production: Case Studies from Malaysia, Indonesia and Myanmar", *FES Publikation*, diakses pada 17 November 2023, di <http://library.fes.de/pdf-files/iez/06769.pdf>.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. 2010. "The Livelihood Impacts of Oil Palm: Smallholders in Indonesia", *Biodiversity and Conservation*, Vol. 19, hlm. 1009--1024. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>.
- Rowland, D., Zanello, G., Waliyo, E., & Ickowitz, A. 2022. "Oil Palm and Gendered Time Use: A Mixed-methods Case Study from West Kalimantan, Indonesia", *Forest Policy and Economics*, Vol. 137. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102682>.
- Sawit Watch. 2019. "Sawit Watch Annual Report 2019", diakses pada 17 November 2023, di <https://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2023/07/Annual-Report-2019-Sawit-Watch.pdf>.
- Sinha, S. 2023. "Agrarian Labour Regimes, Crisis & the Materiality(s) of Dalit Women's Work in India", Working Paper Draft.
- Sinaga, H. 2021. "Buruh Siluman: The Making and Maintaining of Cheap and Disciplined Labour on Oil Palm Plantations in Indonesia", dalam Backhouse, M. et al. (Eds.), *Bioeconomy and Global Inequalities: Socio-Ecological Perspectives on Biomass Sourcing and Production*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68944-5_9.
- Siscawati, M. & Mahaningtyas, A. 2012. "Gender Justice: Forest Tenure and Forest Governance in Indonesia", *Rights and Resources Initiative*, diakses pada 17 November 2023, di https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2014/01/doc_5224.pdf.
- Statista. "Vegetable Oils: Global Consumption 2013/14 to 2022/23, by oil type", diakses pada 17 November 2023, di <https://www.statista.com/statistics/263937/vegetable-oils-global-consumption/>.
- Supriadi, W. 2013. "Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sambas", *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 1(1), diakses pada 17 November 2023, di <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/2785/2770>.
- Tempo. 2018. "Akrobat Lahan Raja Sawit", majalah.tempo.co, diakses pada 17 November 2023, di <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/155107/akrobat-lahan-raja-sawit>.
- Theresia, H. Y. K. & Wahyuni, E. S. 2021. "Peran Gender Buruh Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cimulang, Kecamatan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5(1), hlm. 105--120. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i2.33683>.
- Toumbourou, T. & Dressler, W. 2020. "Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave: Differentiated Gendered Responses in East Kalimantan, Indonesia", *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 62(1), hlm. 40--55, di <https://doi.org/10.1111/apv.12265>.
- United States Department of Agriculture Foreign Agriculture Service. "Palm Oil 2023 World Production", usda.gov, diakses pada 17 November 2023, di https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?startrow=1&cropid=4243000&sel_year=2023&rankby=Production.
- Wichterich, C. 2019. "Care Extractivism and the Reconfiguration of Social Reproduction in Post-Fordist Economies", *ICDD Working Paper*, No. 25, diakses pada 17 November 2023, di <https://kobara.uni-kassel.de/handle/123456789/11680>.

Yallita, M. & Mardhiah, D. 2023. "Pembagian Kerja pada Buruh di Perkebunan Kelapa Sawit", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 6(1), hlm. 38--46. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.728>.

Yeates, N. 2004. „Global Care Chains. Critical Reflections and Lines of Enquiry“, *International Feminist Journal of Politics*, Vol. 6(3), hlm. 369--391. <https://doi.org/10.1080/1461674042000235573>.

Zen, Z., Barlow, C. & Gondowarsito, R. 2005. "Oil Palm in Indonesian Socio-Economic Improvement A Review of Options", *Australia National University Departmental Working Paper*, No. 2005(11), diakses pada 17 November 2023, di https://acde.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/acde_crawford_anu_edu_au/2020-11/2005-11.pdf.

